**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Deskripsi Teori**
2. **Hakikat *halaqah***

Secara etimologis (harfiah) *halaqah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-halqatu* yang berarti lingkaran.[[1]](#footnote-2) *Halaqah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara belajar atau mengajar dengan duduk di atas tikar dengan posisi melingkar atau berjejer.[[2]](#footnote-3) Adapun pengertian *halaqah* secara terminologis sebagaimana yang diungkapkan oleh Herman DM. bahwa *halaqah* adalah proses pembelajaran di mana para murid duduk mengelilingi gurunya.[[3]](#footnote-4)

*Halaqah* atau *liqo`* semakin sering diperbincangkan oleh masyarakat kita saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari efektivitas strategi dakwah Islam ini dalam membangun kepribadian Islam di tengah-tengah masyarakat kita yang semakin surut diterjang oleh arus *westernisasi.*

*Halaqah* merupakan model pembelajaran Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya. Hal ini senada dengan pernyataan Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya, *Muhammad SAW;* *The Super Leader, Super Manager*: “Rasulullah SAW mengajar dan memberi *khutbah* dalam bentuk *halaqah* di mana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan tanya-jawab berkaitan dengan urusan agama dan kehidupan sehari-hari.”[[4]](#footnote-5)

17

M. Alawi al-Maliki menyatakan bahwa:

Imam al-Yusi membuat satu pasal di dalam *Qanun-*nya. Di dalam pasal itu dia menyebutkan prinsip-prinsip dasar menyebarkan ilmu. Dia berkata, pengajaran dalam bentuk *tadris*, asal mulanya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. pada majelis-majelisnya bersama para sahabat di dalam menjelaskan hukum-hukum, hikmah-hikmah, berbagai realitas kontekstual, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an, menuturkan fadhilah-fadhilah serta keistimewaan ayat, dan sebagainya. Dalam majelis-majelis itu mereka berkumpul di samping beliau. Ini adalah tradisi halaqah ilmu yang senantiasa diterapkan para ulama kini dan seterusnya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. pada majelis-majelisnya dalam bentuk halaqah merupakan ketetapan sekaligus keterangan.[[5]](#footnote-6)

Sejak lebih dari 14 abad silam, kaum muslimin telah menggunakan model pembelajaran *halaqah* dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kunci kesuksesan dari model pembelajaran warisan Nabi Muhammad SAW ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nugroho Widiyantoro dalam Surtini terletak pada jumlah peserta yang terbatas (maksimal 12 orang) dalam sebuah kelompok *halaqah*, keteladanan pembimbing (*murabbi*) dan proses pembelajaran yang berkelanjutan.[[6]](#footnote-7)

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *halaqah* adalah model pembelajaran profetik yang bertumpu pada kegiatan pembelajaran secara berkelompok, keteladanan dari pembimbing dan pendekatan kepada peserta didik secara persuasif serta proses pembelajaran yang berkelanjutan. Penerapan *halaqah* di berbagai jalur pendidikan kita (formal, nonformal dan informal) diharapkan mampu mengembalikan kejayaan Islam melalui proses penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan bukan sekedar formalitas belaka.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumya, bahwa *halaqah* merupakan model pembelajaran profetik yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad silam. *Halaqah* menjadi warisan Nabi Muhammad SAW dalam dunia pendidikan Islam yang diikuti turun-temurun oleh para sahabat dan *`alim* ulama dalam mendidik para muridnya.

*Halaqah* sangat identik dengan masjid. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Samsul Nizar bahwa selain berfungsi sebagai tempat beribadah kaum muslimin, masjid juga memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan Islam.[[7]](#footnote-8) Nakoesteen sebagaimana dikutip oleh Hasan Asari dalam Samsul Nizar mengatakan bahwa:

Pendidikan Islam yang berlangsung di masjid adalah pendidikan yang unik karena memakai sistem *halaqah*. Sang syekh biasaya duduk di dekat dinding atau pilar masjid, sementara muridnya duduk di depannya membentuk lingkaran dan lutut para murid saling bersentuhan.[[8]](#footnote-9)

Hasan Asari dalam Samsul Nizar juga menegaskan bahwa peserta *halaqah* memiliki kebebasan dalam mengikuti kegiatan *halaqah* yang dilaksanakan di berbagai tempat dan tanpa adanya ikatan administratif. Sang guru umumnya menggunakan metode diskusi, tanya-jawab dan imla` dalam memimpin jalannya proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi pembelajaran dilakukan menjelang akhir kegiatan *halaqah* oleh guru guna memastikan ketercapaian dari tujuan pembelajaran.[[9]](#footnote-10)

Abuddin Nata menjelaskan bahwa dalam model pembelajaran *halaqah,* sang guru memberikan penjelasan terkait topik pembahasan dengan dikelilingi oleh para muridnya.[[10]](#footnote-11)Abuddin Nata juga menambahkan bahwa kurikulum dalam model pembelajaran initerdiri dari dua jenis, yaitu ilmu agama (*al-`Ulum al-Naqliyah*) dan ilmu pengetahuan umum (*al-`Ulum al-Aqliyah*).[[11]](#footnote-12) Sementara itu, Mahmud Yunus menyatakan bahwa materi dalam kurikulum ilmu agama adalah *tafsir* *al-Qur`an*, *hadits*, *fiqhi* dan *ushul* *fiqh*, *nahwu* *saraf*, *balaghah*, bahasa dan sastranya. Sedangkan, materi dalam ilmu pengetahuan umum adalah *mantiq*, ilmu alam dan kimia, musik, ilmu pasti, ilmu ukur, ilmu *falaq*, ke-Tuhanan, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan dan kedokteran.[[12]](#footnote-13)

Berbagai pemaparan di atas menunjukkan bahwa *halaqah* merupakan model pembelajaran profetik yang cukup menjanjikan dalam mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual. Penerapan model pembelajaran *halaqah* yang terkesan konvensional namun sarat makna dari keteladanan dan pendekatan persuasif seorang guru atau pembimbing menjadikan *halaqah* sebagai model pembelajaran alternatif yang menarik untuk diterapkan di berbagai jalur pendidikan nasional kita saat ini.

1. **Pendidikan karakter**

Karakter berasal dari bahasa Yunani, *charassein* yang berarti *to engrave* atau mengukir.[[13]](#footnote-14) Sedangkan, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Zainal Aqib dan Sujak menjelaskan bahwa: “Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak.”[[14]](#footnote-15)

Nursalim Sirajuddin dalam Jamal Ma`mur Asmani menyatakan bahwa:

Istilah karakter baru dipakai secara khusus dalam konteks pendidikan pada akhir abad ke-18. Pencetusnya adalah FW. Foerster. Terminologi ini mengacu pada sebuah pendekatan idealis-spiritualis dalam pendidikan, yang juga dikenal dengan teori pendidikan normative. Lahirnya pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk menghidupkan kembali paedagogi ideal-spiritual yang sempat hilang diterjang gelombang positivisme yang dipelopori oleh filsuf Prancis, Auguste Comte.[[15]](#footnote-16)

Secara terminologis, pendidikan karakter merupakan upaya peningkatan kualitas peserta didik pada seluruh domain pendidikan yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini senada dengan penjelasan pendidikan karakter menurut Zainal Aqib dan Sujak yang mengemukakan bahwa: “Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.”[[16]](#footnote-17)

Pendidikan karakter tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai dan norma keagamaan serta kemasyarakatan yang merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua peserta didik dan masyarakat umum. Hal yang sama juga diungkapkan oleh T. Ramli dalam Zainal Aqib dan Sujak yang menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang berakar dari moralitas dan akhlak terpuji.[[17]](#footnote-18)

Penerapan sebuah sistem di negeri ini haruslah dilandasi dengan ketetapan konstitusi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem tersebut. Hal ini juga berlaku bagi pelaksanaan pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan Nasional dalam Jamal Ma`mur Asmani menyatakan dasar hukum dalam pembinaan pendidikan karakter sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
5. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
6. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
7. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
8. Renstra Kemendiknas Tahun 2010-2014.
9. Renstra Direkrorat Pembinaan SMP Tahun 2010-2014.[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/ hukum, etika akademis dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), maka Jamal Ma`mur Asmani menyimpulkan lima nilai utama karakter, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai karakter dalam hubunganya dengan Tuhan.

Pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri.

Sikap yang mencerminkan kejujuran, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, ingin tahu, cinta ilmu, berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif serta mandiri.

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama.

Sikap yang mencerminkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh terhadap aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun serta demokratis.

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan.

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

1. Nilai kebangsaan.

Menciptakan sikap nasionalisme dan menghargai keberagaman.[[19]](#footnote-20)

Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga pendidikan formal (sekolah). Lembaga pendidikan informal (keluarga) dan nonformal (masyarakat) juga memiliki peran penting dalam pengembangan karakter peserta didik. Ketiga jalur pendidikan ini diharapkan mampu bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan karakter.

Domain pendidikan karakter meliputi peningkatan kecerdasan spiritual, emosional dan intelegensial peserta didik. Oleh karena itu, tahapan pengembangan karakter akan berorientasi kepada ketiga domain tersebut.

Zainal Aqib dan Sujak memaparkan tentang tahapan pengembangan karakter peserta didik sebagai berikut:

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (*knowing*), pelaksanaan (*acting*) dan kebiasaan (*habit*). Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja, seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan tiga komponen karakter yang baik (*component of good character*), yaitu pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan/penguatan emosi (*moral feeling*) dan perbuatan bermoral (*moral action*). Hal ini diperlukan agar peserta didik atau warga sekolah lain yang terlibat dalam sistem pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, menghayati dan mengamalkan (mengerjakan) nilai-nilai kebajikan (moral).[[20]](#footnote-21)

Tujuan pendidikan karakter adalah menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya pada aspek intelegensial tetapi juga pada aspek spiritual dan emosional. Tujuan pendidikan karakter juga sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[[21]](#footnote-22)

Adapun tujuan pendidikan karakter menurut Jamal Ma`mur Asmani, yakni:

Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.[[22]](#footnote-23)

Pendidikan karakter diharapkan mampu menjadi titik tolak pengentasan berbagai problematika bangsa ini yang bersumber dari degradasi moralitas masyarakat Indonesia.

1. **Sistem *tarbiyah* Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

PKS merupakan salah satu dari sekian banyaknya partai politik di Indonesia yang lahir sejak digulingkannya kepemimpinan presiden Soeharto pada tahun 1998. Wikipedia mengemukakan bahwa PKS adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (9 *Jumadil 'Ula* 1423 H) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (26 *Rabi'ul Awwal* 1419 H).[[23]](#footnote-24)

PKS menduduki urutan ke empat perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum 2009 silam.[[24]](#footnote-25) Partai Islamis ini sukses mendulang sebanyak 8.206.955 suara (7,9%). Dengan hasil ini, PKS berhak mendapatkan 57 jatah kursi di Senayan dari total 570 anggota DPR Republik Indonesia.[[25]](#footnote-26) Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang bulan sabit dan untaian padi ini.

Anggaran Dasar PKS sebagaimana dikutip Yon Machmudi mengemukakan tujuan dari partai Islamis ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera yang berlandaskan Pancasila.[[26]](#footnote-27) Guna mencapai tujuan tersebut, Anggaran Dasar PKS dalam Yon Machmudi merumuskan beberapa usaha yang harus dilakukan:

1. Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman.
2. Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami.
3. Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa mendatang.
4. Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5. Membangun Negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa.[[27]](#footnote-28)

M. Imdadun Rahmat menyatakan bahwa:

Sebagai gerakan keagamaan dan sekaligus gerakan politik, PKS memiliki strategi perjuangan yang bersumber dari pemikiran dan konsep dakwah yang dianutnya. Konsep gerakan yang menjadi acuan PKS adalah pemikiran dan konsep dakwah Ikhwanul Muslimin (IM). Konsep ini diperkenalkan, dipelajari, dan disosialisasikan di kalangan kader tarbiyah dan dipraktikkan dalam segala aktifitas dakwah tarbiyah.[[28]](#footnote-29)

Anis Matta dalam M. Imdadun Rahmat mengemukakan bahwa konsep dakwah *Ikhwanul Muslimin* yang menjadi acuan dalam menggerakkan roda perpolitikan PKS terletak pada sistem *tarbiyah* yang meliputi rumusan, tahapan perjuangan dan strategi serta substansi pendidikan bagi para kadernya.[[29]](#footnote-30) Adapun konsep dakwah PKS melalui gerakan *tarbiyah,* menurut M. Imdadun Rahmat melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama disebut *marhalah ta`rif* yakni pengenalan ideologi politik PKS kepada masyarakat luas. Tahap kedua disebut *musyarakah siasiyah* yakni melahirkan partisipasi politik kader dan simpatisan PKS melalui kaderisasi dan pembinaan. Tahap ketiga disebut *marhalah tanfidz* yakni mengambil peran strategis dalam peta perpolitikan nasional dan internasional.[[30]](#footnote-31)

M. Imdadun Rahmat menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kegiatan *tarbiyah* PKS meliputi *halaqah, dauroh, rihlah* (berwisata)*, mabit* (kegiatan malam)*, mukhayyam* (perkemahan)*,* seminar dan bedah buku.[[31]](#footnote-32) Selain itu, M. Imdadun Rahmat juga menyatakan bahwa *halaqah* merupakan konsep *tarbiyah* dalam pembinaan kader dan simpatisan PKS di mana setiap *murabbi* (pembimbing *halaqah*) mempertanggungjawabkan *halaqah* yang dibinanya kepada *murabbi* senior yang membimbingnya dalam *halaqah* yang diikutinya. Skema ini kemudian diperluas sehingga mampu menciptakan jaringan berskala nasional dan internasional.[[32]](#footnote-33) Oleh karena itu, jaringan *tarbiyah* ini menurut M. Imdadun Rahmat tercatat rapi dalam administrasi PKS.[[33]](#footnote-34)

Adapun tujuan *tarbiyah* PKS yang terurai dalam Modul Manajemen *Tarbiyah* Anggota Pemula PKS sebagaimana dikutip M. Imdadun Rahmat bahwa:

… Tarbiyah diharapkan menghasilkan para peserta yang memiliki kriteria tertentu terkait dengan aqidah yang lurus (*salimul aqidah*), ibadah yang benar (*shalihul ibadah*), akhlak yang baik (*matinul khuluq*), berkemampuan produktif (*qadirun ala al-kasbi*), berwawasan luas (*mutsaqqaful fikri*), berbadan kuat (*qawiyyul jismi*), mampu memerangi nafsu (*mujahidun linafsihi*), mampu mengatur diri (*munaddalamun fi syu`unihi*), mampu mengatur waktu (*haritsun ala waqthihi*), dan bermanfaat bagi orang lain (*nafi`un li ghairihi*).[[34]](#footnote-35)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa PKS memiliki peran ganda dalam jagat perpolitikan nasional maupun internasional. Selain mengusung gerakan politik, PKS juga membawa misi dakwah dalam mengokohkan pribadi Islami setiap muslim di Indonesia. Misi dakwah dan percaturan politik berusaha digabungkan oleh partai Islam terbesar di Indonesia ini. Gerakan *tarbiyah* yang diadopsi PKS dari *Ikhwanul Muslimin* menjadi motor dalam penyebarluasan dakwah Islam. Di sisi lain, para politisi PKS yang bertarung dalam percaturan politik tanah air dan luar negeri merupakan produk dari sistem pengkaderan yang dilandaskan pada gerakan *tarbiyah* yang berlangsung secara kompleks. Sinergitas antara gerakan *tarbiyah* dan politik menjadi senjata utama PKS dalam mengaktualisasikan visi dan misi partai.

1. **Hasil Penelitian yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji efektivitas *halaqah* sebagai model pembelajaran alternatif dalam mencapai tujuan pendidikan. Hasil penelitian Surtini pada tahun 2011 menyimpulkan bahwa:

*Halaqah* *tarbiyah* saat ini dan *insya Allah* di masa yang akan datang menjadi alternatif sistem pendidikan Islam yang cukup efektif untuk membentuk muslim berkepribadian Islami. Apa lagi sampai saat ini para pemikir dakwah belum dapat menemukan sistem alternatif lain yang sama efektifnya dalam mencetak kader Islam yang tangguh seperti yang dihasilkan oleh *halaqah*. Di desa Wanua Jaya, *halaqah* telah terbukti mampu membentuk masyarakatnya berkepribadian Islami. Tidak menjadikan Islam sebagai konseptual atau ibadah *mahdhoh* saja melainkan Islam dijadikan standar aktifitas mereka di manapun dan dalam kondisi apapun.[[35]](#footnote-36)

Keberhasilan *halaqah* dalam membentuk muslim berkepribadian Islami berkorelasi dengan peningkatan kecerdasan spiritual peserta *halaqah.* Terkait hal ini, Danah Zohar dan Ian Marshall dalam Sukidi menjelaskan keutamaan *Spritual Quotion* (*SQ*) dibandingkan *Intelegence Quotion* (*IQ*) dan *Emotional Quotion* (*EQ*) sebagai berikut: “*SQ is the necessary foundation for the effective functioning of both IQ and EQ. It is our ultimate intelligence.”*[[36]](#footnote-37)Kecerdasan spiritual merupakan hal mendasar guna memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara efektif. Danah Zohar dan Ian Marshall juga menegaskan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi manusia.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran *halaqah* efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Pembinaan melalui kegiatan *halaqah* tidak hanya meningkatkan kecerdasan spiritual, melainkan juga akan meningkatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual peserta didik. Efektivitas *halaqah* sebagai model pembelajaran profetik akan tercermin dalam aktifitas keseharian peserta didik yang menjunjung tinggi nilai dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan landasan pemahaman terkait permasalahan penelitian sampai pada pencapaian tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif, kerangka berpikir terletak pada kasus yang selama ini diamati oleh peneliti. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pendidikan Karakter

melalui Kegiatan *Halaqah*

Mengatasi krisis integritas

dengan pendekatan profetik

Karakter Islami

Krisis Integritas

Jalur Pendidikan Formal

Jalur Pendidikan Nonformal

Jalur Pendidikan Informal

Masyarakat

Keluarga

*Halaqah*

Individu

Model Pembelajaran

Nabi Muhammad SAW

Sistem *Tarbiyah* PKS

Sistem Pendidikan Nasional

1. Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet. XXV; Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 290. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Pendidikan Nasional R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Ed. III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 383. [↑](#footnote-ref-3)
3. Herman DM., *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Kendari: CV. Shadra, 2008), h. 12. [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW; The Super Leader, Super Manager* (Cet. IX; Jakarta: Pro LM Centre, 2007), h. 185. [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Alawi al-Maliki, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Rasulullah, terj.* Muhammad Ihya `Ulumiddin (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 8. [↑](#footnote-ref-6)
6. Surtini, *Efektifitas Halaqah dalam Membentuk Kepribadian Islam Masyarakat di Desa Wonua Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan* (Skripsi Sarjana, Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari, 2011), h. 10. [↑](#footnote-ref-7)
7. Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 9. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.,* h. 10. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 34. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.,* h. 120. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid.,* h. 120-121. [↑](#footnote-ref-13)
13. “Pendidikan Karakter; Apa Lagi?” (Online), [http://insistnet.com/index.php?option=com\_ co](http://insistnet.com/index.php?option=com_%20co)ntent&view=article&id=177:pendidikan-karakter-apa-lagi&catid=23:pendidikan-islam&itemid = 23 (diakses pada tanggal 21 Mei 2012) 2010. [↑](#footnote-ref-14)
14. Zainal Aqib, dan Sujak, *Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter* (Cet. I; Bandung: Yrama Widya, 2011), h. 2. [↑](#footnote-ref-15)
15. Jamal Ma`mur Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah* (Cet. I; Jogjakarta: Diva Press, 2011), h. 26-27. [↑](#footnote-ref-16)
16. Aqib, dan Sujak*, Panduan….,* h. 3. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
18. Asmani, *Buku….,* h. 41-42. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*., h. 36-41. [↑](#footnote-ref-20)
20. Aqib, dan Sujak*, Panduan….,* h. 9. [↑](#footnote-ref-21)
21. Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” dalam Evi Rine Hartuti, *et al., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jogjakarta: Laksana, 2012), h. 15. [↑](#footnote-ref-22)
22. Asmani, *Buku….,* h. 43. [↑](#footnote-ref-23)
23. “Partai Keadilan Sejahtera”(Online), <http://id.wikipedia.org/w/index.Php?title=Partai>keadi[l ansejahtera& redirect=no](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partai_keadilan_sejahtera&redirect=no) (diakses pada tanggal 12 Oktober 2011) 2011. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
26. Yon Machmudi, *Islamising Indonesia: the Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)* (Canberra: ANU E Press, 2008), h. 232. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-28)
28. M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Cet. II; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2008), h. 124. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.,* h. 125. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.,* h. 127-128. [↑](#footnote-ref-31)
31. M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 115. [↑](#footnote-ref-32)
32. Rahmat, *Ideologi ….,* h. 270. [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid.,* h. 243. [↑](#footnote-ref-35)
35. Surtini, *Efektifitas* …., h. 73. [↑](#footnote-ref-36)
36. Sukidi, *Kecerdasan Spiritual: Mengapa SQ Lebih Penting daripada IQ & EQ* (Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004),h. 69. [↑](#footnote-ref-37)